

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAPUAS  
KABUPATEN SANGGAU**

Oleh :

**EVA HERAWATI<sup>1\*</sup>**

NIM : E1031161004

Dr. Sri Maryuni, M.Si<sup>2</sup>, Drs. Agus Eka, M. Si<sup>2</sup>

\* Email : [e1031161004@student.untan.ac.id](mailto:e1031161004@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor koordinasi menurut Hasibuan yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas dan disiplin. Adapun hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya koordinasi yang kurang efektif yaitu kurangnya kontribusi anggota dalam penyusunan dan penyampaian suatu agenda, keterlambatan penyampaian informasi, dan juga masih banyak nya pegawai yang tidak disiplin dan keluar pada saat jam kerja, namun dalam hal pembagian kerja sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saran dari penelitian ini yaitu dilakukan penjadwalan untuk mengatur pertemuan atau rapat; bersedia mengubah perilaku sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masing-masing anggota; dan mengubah alat absensi dari yang manual ke *fingerprint* sehingga data yang masuk tidak dapat dipalsukan dan absensi tersebut dilakukan dua kali dalam hitungan keseluruhan jumlah jam kerja.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Pemerintah Daerah, Pendidikan

## ABSTRACT

**Eva Herawati. E1031161004: Local Government Coordination in Educational Sector at Kapuas District of Sanggau Regency. An Undergraduate Thesis. Governmental Science Study Program in Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.**

This research meant to identify and analyse causing factors in Local Government Coordination in Educational Sector at Kapuas District of Sanggau Regency. This research used descriptive research type with qualitative approach. The subjects of this research were determined by purposive technique. The problem of this research was affected by coordination factors which is according to Hasibuan it refers to action, communication, division of task, and discipline units. The result of this study showed that there were factors causing the uneffective coordination which were the lack of members' contribution in arranging and delivering an agenda, the lateness of information delivery, and also indisciplinary employees who were going out in working hours. But in the division of task, it was quiet good and it was suitable with applicable regulation. The recommendation the researcher is that to do scheduling in orser to set up gathering or meeting; willing to change behaviour as one of the ways to increase every member's awareness; and to substitute attendance tool from manual to finger print so that the incoming data cannot be falsed and the attendance will be done twice during working hours.

**Keywords: Coordination, Local Government, Education**

## A PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mencapai kesatuan tindakan untuk pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. Koordinasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara individu dalam suatu organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Koordinasi itu penting dalam suatu organisasi, karena berhubungan dengan keefektifan organisasi dan unit-unit lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah, menurut pasal 1 koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antara antara instansi vertikal dengan dinas daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 diketahui bahwa kepala wilayah adalah pejabat

yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum di wilayah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat.

Berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selain itu pendidikan merupakan salah satu jalan dalam meningkatkan sumberdaya manusia mengingat kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan kualitas sumber daya manusia, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut pendidikan merupakan salah satu faktor yang diyakini dapat menciptakan manusia yang produktif yang dapat memajukan bangsanya. Menurut Kunaryo (2000, 21) Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan

sumber daya manusia, karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia yang produktif yang mampu memajukan bangsanya.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah juga menyebutkan pelaksanaan koordinasi juga terkait dengan permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi, dalam hal ini juga terkait dengan pelaksanaan permintaan data dan pendapat dari forum-forum koordinasi yang tentunya berpengaruh pada komunikasi antar dinas dan juga agenda rapat atau pertemuan yang akan diadakan. Selain itu disebutkan juga pada pasal 6(4) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas kepala dinas daerah dan kepala instansi vertikal saling memberikan informasi. Dalam pelaksanaannya koordinasi dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Kecamatan Kapuas sebagai satuan wilayah dan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai pihak yang menangani bidang pendidikan yang diawasi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang bertugas di wilayah kecamatan.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dilakukan identifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi instansi yang bersangkutan dalam kegiatan rapat koordinasi.
2. Kurangnya kontribusi Dinas Pendidikan, Kecamatan dan Korwil dalam penyusunan dan penyampaian suatu agenda.
3. Keterlambatan dalam penyampaian informasi dari pihak Kecamatan dan Korwil.

### 3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat permasalahan, berkaitan dengan hal tersebut untuk mempersempit ruang lingkup masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah diharapkan, maka fokus penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau kurang efektif.

### 4. Rumusan Masalah

Untuk itu permasalahan yang akan diteliti, agar penelitian memiliki arah yang jelas, terlebih dahulu harus dirumuskan masalah nya. Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menyebabkan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terkait dalam bidang pendidikan kurang efektif ?.

### 5. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis faktor-faktor penyebab koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam bidang pendidikan yang kurang efektif.

### 6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi sebagai penerapan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dengan ilmu pemerintahan, secara khusus konsep-konsep yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah daerah, dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbandingan antara realita dan teori yang berlaku.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian yang dapat dijadikan suatu saran pemikiran terhadap instansi terkait yang berada di wilayah Kabupaten Sanggau dalam

menjalankan fungsinya, serta sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam memahami masalah yang ada, dalam memberikan arahan terhadap pegawai. Selain itu menjadi suatu bahan untuk evaluasi kerja agar dapat menangani tugas dan pekerjaan dengan baik sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Koordinasi**

Ndraha (2003, 290) Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, mensterilkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan spesifik berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan terarah pada tujuan tertentu pada saat ditetapkan. Koordinasi adalah kemampuan dalam menyesuaikan tindakan yang dikhususkan untuk menyatukan suatu kegiatan dari organisasi agar dapat diterima oleh seluruh anggota dari organisasi agar terciptanya suatu tujuan yang teratur dan tertata hingga

kesepakatan tersebut ditetapkan organisasi.

Sedangkan menurut Moekijat (1994, 2) Koordinasi adalah penyalarsan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu penjelasannya dari teori tersebut ialah koordinasi berhubungan dengan tugas dan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi yang mempunyai keterkaitan antar individu dalam suatu organisasi dalam penyesuaian tindakan dan wewenang untuk mewujudkan tujuan bersama yang diinginkan oleh organisasi. Saling ketergantungan antar lingkungan internal ataupun eksternal, hierarki atau tingkatan koordinasi sebenarnya didasarkan pada tingkat saling ketergantungan dalam berbagai pihak.

Koordinasi juga diartikan sebagai proses terus menerus yang artinya bahwa koordinasi adalah usaha yang berkesinambungan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya pengaturan usaha yang teratur diartikan sebagai salah

satu upaya untuk menyatukan tindakan dari masing-masing anggota organisasi. Tujuan akhir dari koordinasi adalah tujuan bersama yaitu sebagai hasil dari usaha kerjasama dari anggota organisasi yang proses nya dilakukan secara terus menerus, dan diatur dalam usaha atau kegiatan kelompok secara terarah. Dengan kesatuan tindakan yang dimiliki oleh setiap anggota-anggota dan yang diarahkan oleh pimpinan.

Oleh sebab itu pengelompokan jenis-jenis koordinasi diartikan sebagai pembeda jika dilihat dari tingkatan dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya seluruh rangkaian dari organisasi memiliki ketergantungan satu sama lain. Pengelompokan dari koordinasi di bagi dalam beberapa jenis. Jenis koordinasi dapat digolongkan menjadi koordinasi internal, eksternal dan horizontal. Jenis koordinasi menurut Suganda (1998, 25) yaitu:

- a. Koordinasi internal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.

- b. Koordinasi eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- c. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antara pejabat yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.

Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Faktor – Faktor yang mempengaruhi koordinasi Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

- a. Kesatuan Tindakan
- b. Komunikasi

- c. Pembagian Kerja
- d. Disiplin

## 2. Faktor-Faktor Koordinasi

Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Faktor – Faktor yang mempengaruhi koordinasi Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

- a. Kesatuan Tindakan
- b. Komunikasi
- c. Pembagian Kerja
- d. Disiplin

## 3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat (2) UUD RI tahun 1945.

Menurut Rahayu (2017, 1) Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 4. Pendidikan

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional dijelaskan pada bab IV tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, dikatakan bahwa kewajiban dari pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan pendidikan di wilayah pemerintahan dijelaskan pada pasal 10, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 11 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Menurut Tilaar (2002, 435) hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai

suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

### 5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya anggapan kesamaan, menyontek atau meniru penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan oleh:

1. Larasatie, Yunita Claudia. 2015. *Koordinasi Antar Instansi Dalam Meningkatkan Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pontianak*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura.

Penelitian lain dilakukan Yunita Claudia Larasatie, berjudul: “Koordinasi Antar Instansi Dalam Meningkatkan Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pontianak Pada Tahun 2015. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antar instansi dalam meningkatkan program kota layak anak (KLA) di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Tripathi dan Reddy. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap analisis yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian ini di tiga instansi di wilayah Kota Pontianak yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Anak Dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu belum optimalnya koordinasi disebabkan oleh beberapa faktor

yaitu kontinuitas yang tidak berjalan, tujuan yang tidak jelas, organisasi yang tidak sederhana, perumusan wewenang dan tanggungjawab yang kurang jelas dan komunikasi yang kurang. Oleh karena itu rekomendasinya adalah mengoptimalkan kontinuitas, mensederhanakan organisasi, memperjelas perumusan wewenang dan tanggungjawab serta mengoptimalkan komunikasi.

2. Saulus, F. Fadry, 2015. *Koordinasi Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Di Desa Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

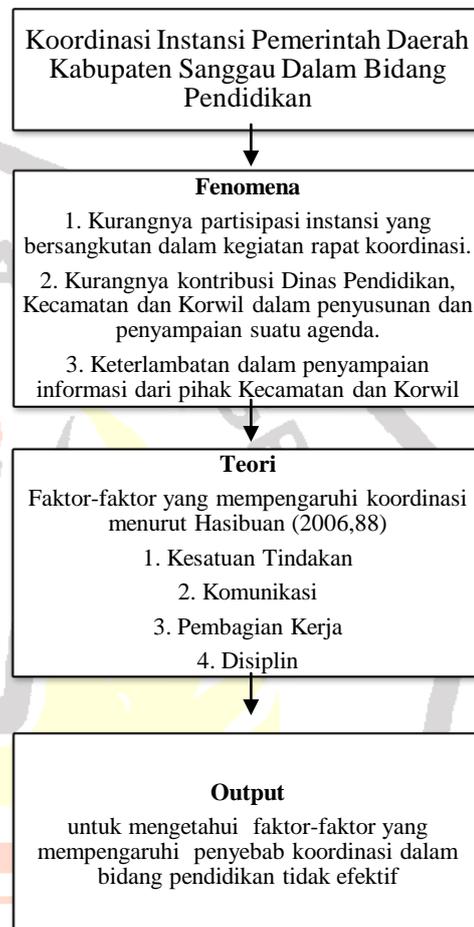
Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah penelitian F. Fadry Saulus berjudul *Koordinasi Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Di Desa Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*. Penelitian ini didasarkan oleh adanya fenomena yang terjadi di Desa Sungai Mawang dengan Badan Pertanahan Nasional

yang tidak adanya tindak lanjut atas tanah hak milik adat yang sudah didaftarkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi yang dibangun antara pemerintah Desa Sungai Mawang dengan kecamatan dan badan pertanahan nasional.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumen, pelaksanaan penelitian pengelolaan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan, implikasi, saran. Instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah koordinasi di desa sungai mawang adalah teori yang diungkapkan oleh Handokoyaitu

komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas dan pendelegasian wewenang.

## 6. Kerangka Pikir Penelitian



## C METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan koordinasi yang dilakukan oleh instansi

pemerintah daerah di Kecamatan Kapuas. Menurut Sugiyono (2011, 381) digunakannya pendekatan kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin pada suatu instansi sosial tersebut dijaring dengan pendekatan kuantitatif dengan instrumen seperti tes kuesioner, dan pedoman wawancara.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian pendahuluan (*Pra Survey*), Membuat usulan penelitian, Pengambilan data sekunder dan primer, Membuat laporan penelitian (Skripsi).

#### 2. Studi Lapangan

Dalam pengambilan data primer, peneliti sekaligus melakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data dilapangan (wawancara atau observasi), artinya waktu menganalisis dan pengambilan data dilakukan secara bersamaan.

Lokasi penelitian ini Adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Sanggau, Kantor Kecamatan Kapuas Dan Kantor Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Kapuas. Alasannya karena dinas pendidikan dan kebudayaan serta koordinator pendidikan wilayah Kecamatan Kapuas merupakan dinas dan UPT yang mempunyai wewenang dalam bidang pendidikan di wilayah kecamatan kapuas, sedangkan Kecamatan Kapuas merupakan pihak yang berwenang dalam urusan pemerintahan di kecamatan.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau**

Koordinasi Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Pemerintah daerah dapat mengurus sendiri dan mengatur urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penerapan Kebijakan otonomi ini adalah upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan juga lebih mengetahui tentang kebutuhan dan keluhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang Pemerintahan ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan Pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati. Dalam menjalankan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi tertentu yaitu sebagai pelaksana dukungan administrasi di bidang pendidikan sekolah dasar dan pelaksana koordinasi operasional

unit dalam bidang pelaksana teknis dinas atau badan.

Informasi serta data yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah daerah dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kapuas kabupaten sanggau. Masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian adalah bagaimana efektivitas dari koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kapuas. Penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai dampak dari kurang efektifnya proses koordinasi pemerintah daerah dalam menangani bidang pendidikan.

## **2. Kesatuan Tindakan**

Pada kegiatan koordinasi memerlukan kesadaran tiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri pada tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya, oleh karena itu konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari kegiatan organisasi. Koordinator wilayah Kecamatan Kapuas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kesatuan tindakan sesuai dengan hasil perundingan pada rapat koordinasi yang dilakukan

oleh pihaknya bersama dengan camat dan kepala dinas namun hal tersebut juga tidak dilakukan rutin, dan rapat koordinasi tersebut dilakukan jika ada suatu permasalahan. kesatuan tindakan koordinasi dalam bidang pendidikan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sudah dilakukan dan penyampaiannya melalui rapat koordinasi namun hanya dilakukan 1 bulan 2 kali dan apabila pihak Dinas mendapatkan laporan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan rapat tersebut tidak rutin dilaksanakan. Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kesatuan tindakan telah dilakukan untuk menyatukan pendapat dan juga mengatur wewenang apa saja yang menjadi tugas dari masing masing instansi yang kemudian dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga melaksanakan hasil rapat koordinasi, namun dapat diketahui bahwa rapat tersebut hanya diadakan 2 kali 1 bulan dan hanya diadakan apabila terjadi keadaan darurat sehingga harus dicari jalan keluarnya dalam waktu dekat, selain itu rapat tersebut juga tidak rutin diadakan,

pada saat rapat juga masih banyak pihak yang berwenang tidak menghadiri dikarenakan adanya kesibukan pribadi dan pada rapat tersebut juga di paparkan mengenai permasalahan dan bagaimana jalan keluar yang semestinya dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

### **3. Komunikasi**

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Maka, komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikan kepada orang tersebut dalam koordinasi.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi terkait koordinasi pendidikan masih ada kekurangan salah satunya adanya keterlambatan pengumpulan kelengkapan berkas yang kurang sehingga menyebabkan berbagai pihak yang bersangkutan kewalahan dalam pengumpulan kelengkapan dan tentunya merugikan berbagai pihak yang terkait. Selain itu jadwal yang belum terkoordinir padahal sebelumnya sudah dikomunikasikan dan dijadwalkan dengan matang namun masih saja ada yang tidak hadir dalam agenda yang diadakan.

#### **4. Pembagian Kerja**

Prinsip pembagian kerja ini adalah suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas jadi, pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis. Hasil

wawancara dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan mengatakan jika dinas pendidikan melakukan pembagian kerja sesuai dengan tupoksi yang berlaku dan kemudian pembagian tugas terdiri dari aset, sarana dan prasarana guru dan tenaga kependidikan, dan juga pengelolaan pendidikan luar sekolah yang kemudian dilakukannya pembagian tugas masing-masing sesuai dengan wilayah yang kemudian data tersebut dihimpun dan dilaporkan kepada pihak kecamatan kemudian dilanjutkan kepada dinas pendidikan.

#### **5. Disiplin**

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Sikap disiplin dapat dilihat dari cara menjalankan programnya apakah sudah sesuai atau tidak, dari penelitian yang dilakukan penulis di ketiga instansi tersebut masih ditemukan sikap disiplin seperti tidak tepat waktu dan keluar pada saat jam kerja masih banyak, kenyataan nya hal-hal tersebut masih banyak dilakukan oleh pegawai nya terlebih masih banyak pegawai yang tidak hadir dalam apel pagi dan siang kemudian keluar jam kerja setelah apel berlangsung.

Hubungan antara camat, dinas dan korwil adalah sebagai sebuah mitra, artinya pihak-pihak tersebut juga bekerja sama dalam kesatuan tindakan. Camat, dinas dan korwil juga harus melakukan komunikasi, mengingat bahwa koordinasi yang dilakukan harus melalui proses komunikasi baik dari pihak camat, dinas ataupun korwil nya sehingga terlaksananya pembagian kerja yang sesuai tanpa memberatkan beban kepada pihak pihak yang terkait. Semua itu harus diikuti dengan sikap disiplin dari pegawainya agar terlaksananya pelaksanaan koordinasi yang baik.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa bentuk koordinasi yang tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: 1). Kesatuan Tindakan, 2). Komunikasi 3). Pembagian Kerja, 4). Disiplin. Koordinasi ditimbulkan dari faktor-faktor koordinasi yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya yang dapat dinilai dari ada atau tidaknya kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Koordinasi yang kurang efektif dapat dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi yang pertama yaitu Kesatuan Tindakan, Kesatuan tindakan ini memerlukan kesadaran tiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri pada tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi yang lainnya. Pada pelaksanaannya kesatuan tindakan sudah dilakukan sesuai dengan tugasnya, hanya saja agenda rapat yang dilakukan tidak rutin dan

dilakukan apabila dalam keadaan mendesak saja dan hanya dilakukan paling banyak 2 kali dalam 1 bulan hal tersebut dikarenakan adanya kesibukan dari masing-masing anggota.

Faktor kedua yaitu Komunikasi, komunikasi merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi yang dilakukan sudah ada hanya saja, penyampaian informasi dinilai terlambat, sehingga menyebabkan keterlambatan pengumpulan berkas, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Faktor ketiga yaitu Pembagian Kerja, pembagian kerja ini adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Pembagian kerja yang dilakukan juga sudah baik, pembagian kerja nya dapat dilihat dari masing-masing perbup dan peraturan pemerintah yang sesuai dengan instansi nya.

Faktor keempat yaitu Disiplin, sikap disiplin dapat diukur

jika melihat ketepatan waktu dan usaha secara maksimal atau tidak yang dilakukan dan melihat hasil dari usaha tersebut. Sikap disiplin dapat dilihat dari cara menjalankan programnya apakah sudah sesuai atau tidak, dan dari sikap disiplin seperti tidak tepat waktu dan keluar pada saat jam kerja masih banyak, kenyataannya hal-hal tersebut masih banyak dilakukan oleh pegawai nya terlebih masih banyak pegawai yang tidak hadir dalam apel pagi dan siang kemudian keluar jam kerja setelah apel berlangsung.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan kesatuan tindakan sebaiknya dilakukan penjadwalan untuk mengatur pertemuan atau rapat agar mengurangi ketidakhadiran dari peserta rapat.
2. Seharusnya dalam penyampaian informasi seluruh bagian organisasi memahami kebutuhan-

kebutuhan dari semua anggota dalam organisasi maka kinerja anggota akan maksimal dan hasilnya dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Pembagian kerja yang dilakukan sudah cukup baik, namun alangkah baiknya lagi pembagian kerja dilakukan sesuai dengan SOP dan diawasi oleh pimpinan untuk mencegah pegawai yang tidak berkerja dan bermalas-malasan terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya.
4. Untuk meningkatkan kedisiplinan dari organisasi sebaiknya masing-masing pemimpin organisasi berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi untuk bersedia mengubah perilaku sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dari masing-masing anggota organisasi agar mentaati aturan yang berlaku oleh organisasi, cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah alat absensi dari yang manual ke

*fingerprint* sehingga data yang masuk tidak dapat dipalsukan dan absensi tersebut dilakukan dua kali dalam hitungan keseluruhan jumlah jam kerja.

## F. REFERENSI

### A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Administrasi dan Management*. Jakarta: GunungAgung.
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi : Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy. J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.

Riant Nugroho. 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stoner, Freeman, dan Gilbert. 2007. *Manajemen, Alih Bahasa Alexander Sindoro*. Jakarta: Prenhallindo.

Sugandha, Dann. 1998. *Koordinasi, alat pemersatu gerak administrasi*. Jakarta: intermedia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sutarto. 2000. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Tilaar, H. A. R. 2002. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: RemajaRosdaKarya.

Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia

## 2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan